

DAFTAR PUSTAKA

- Abdhillah, I. R., & Narastri, M. (2025). The influence of transparency and accountability on the effectiveness of village revenue and expenditure budget governance (APBDes) to achieve good governance in villages of Wonoayu District, Sidoarjo Regency. *Business and Investment Review*, 3(2), 1–9. <https://doi.org/10.61292/birev.163>
- Adi, I. R. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: Dari pemikiran menuju penerapan*. FISIP UI Press.
- Aditya, Y. F. P., & Hapsari, A. N. S. (2020). Local wisdom: Can it mitigate the risk of fraud? *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 4(1), 18–34. <https://doi.org/10.35310/accruals.v4i01.382>
- Agus B. Siswanto, & M. Arif S. (2012). *Manajemen proyek*. Journal of the Korean Physical Society, 60(5), 674–679.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*.
- Andrianto, N. (2007). *Transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government*. Bayumedia Publishing.
- Ariyaningsih, B., Subagyov, A., Suhartono, B., Rivai, F. H., & Rajab, R. (2023). Implementation of e-governance to encourage integrated public services in Lebak Regency. *KnE Social Sciences*, 159–180. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13545>
- Asnariza, A., Hamdiah, C., Sarboini, S., & Musriadi, M. (2020). Accountability, community participation, and transparency of public policy of council knowledge on regional budget and financial supervision. *Proceedings of the 3rd International Conference on Economic and Social Science (ICON-ESS)*. <https://doi.org/10.4108/eai.17-10-2018.2294170>
- Awa, A. C. D., & Djohan, D. (2025). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Aimere Timur Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Provinsi. *Etika Jurnalisme pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*.
- Bahrana, N., Naz'aina, N., & Haykal, M. (2021). Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik terhadap pengawasan keuangan daerah. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 6(2), 75–89. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v6i2.5228>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. UGM Press.
- Friantama, P., & Mukhzarudfa, M. (2018). Pengaruh pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi

- masyarakat dan akuntabilitas publik sebagai variabel moderating. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)*, 3(3), 12–19.
- Gelang, F. J., Sonbay, Y. Y., & Timuneno, A. Y. W. (2023). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 11(2), 87–90. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v6i2.2511>
- Gibsi O, S., & Valiant, R. (2019). Analisis pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1), 78–86. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.01.10>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pendampingan penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) di Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK)*, 5(2), 95–101. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i2.1885>
- Hughes, O. E. (2003). *Public management and administration*. <https://doi.org/10.1007/978-1-137-00305-8>
- Iddi, B. (2018). Challenges and opportunities for community participation in monitoring and evaluation of government projects in Tanzania: Case of TASAF II, Bagamoyo District. *Journal of Public Policy and Administration*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.11648/j.jppa.20180201.11>
- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan Eviews dalam analisis data penelitian*.
- Jumame, S. T., Jitmau, F., & Siwolo, Y. A. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan dana desa. *Jurnal Pitis AKP*, 4(2), 1–6.
- Kada'di, E. (2021). *Metode penelitian sosial: Pendekatan kuantitatif dan kualitatif*. Graha Ilmu.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Code of good corporate governance Indonesia 2006*. National Committee on Governance. https://www.ecgi.global/sites/default/files/codes/documents/indonesia_cg_2006_en.pdf
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik*. UII Press.

- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(10), 1–10.
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 33–46. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi.
- Marschall, A. (2006). *Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan: Teori dan praktik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Maselangi, Y. P., R. I. R., & Sauqi, A. (2022). Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di Desa Sepakuan. *MITZAL: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 7(1), 27–35. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v7i1.2868>
- Mawei, M. P. (2021). Function implementation of village consultative agency in Sendangan Satu Sonder District Minahasa Regency. *International Journal of Social Science and Human Research*, 4(10). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i10-49>
- Merina, C. I., Verawaty, V., & Yolantri, A. (2018). Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah Bengkulu Selatan. *Prosiding Semhavok*, 1(1), 73–82.
- Nimas Ayu Wulandari, & Sujatmika. (2024). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. *Journal GEEJ*, 7(2), 19–30.
- Notoatmodjo, S. (2005). *Metodologi penelitian kesehatan*.
- Nugraha, B. (2022). *Pengembangan uji statistik: Implementasi metode regresi linier berganda dengan pertimbangan uji asumsi klasik*. Pradina Pustaka.
- Nurwulandari, A. (2023). The effectiveness of village financial management in Sukabakti Village, Tambelang District, Bekasi Regency. *Journal of Economics and Business (JECOMBI)*, 3(3), 125–131. <https://doi.org/10.58471/jecombi.v3i03.59>
- Olson, D. L., & Wu, D. D. (2015). The accounting perspective. In *Enterprise risk management* (pp. 31–41). https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003
- Palandeng, L. M., & Pioh, N. R. (2022). Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *Politico: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/44326>

- Pirniakan, A. L. (2020). The definition and types of supervision and control in Iranian law. *Interdisciplinary Legal Research*, 1(1), 67–79. <https://doi.org/10.29252/qjilr.1.1.67>
- Pratama, F. R., Amil, Zitri, I., & Sutarna, I. T. (2023). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.
- Rahman, M. G. (2000). *Good governance: Prinsip, komponen, dan penerapannya*. Komnas HAM.
- Raja, T. S. M., & Amanah, L. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–18.
- Ramdhani, M. R. A. (2018). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah di Kabupaten Luwu Timur. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rusmianto, R., Maryani, M., & Makhsun, A. (2018). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan terhadap hubungan antara pengetahuan BPD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 12(1), 32–44.
- Salam, A. (2024). Evaluasi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat: Tantangan dan hambatan di Desa Pasirlangu, Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 10(2), 11–22.
- Saputro, A., Sholihin, M. R., & Purnomo, H. (2021). Management of village funds in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 5(2), 63–73. <https://doi.org/10.30741/assets.v5i2.691>
- Saragih, D. P., & Alpi, M. F. (2023). Pengaruh partisipasi masyarakat dan tata kelola terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel intervening. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3842>
- Sari, P. A., & Askari, S. (2021). Analisis partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa menurut prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Sigalingging, A. H., & Warjio. (2019). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 85–107.

- Simarmata, S. P. (2018, Agustus 10). 3 pegawai Inspektorat Pemkab Batubara, 1 kades terjaring OTT. *Medanbisnisdaily.com*.
<https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/08/10/47188>
- Sopannah. (2003). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1160–1173.
- Suchaini, U. (2024, Januari 3). Wajah suram korupsi di desa. *Kompas.id*.
<https://www.kompas.id/artikel/wajah-suram-korupsi-di-desa>
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Sugista, R. A. (2017). *Akuntabilitas organisasi: Teori dan praktik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*.
- Sundry, R. I., Effendy, D., & Irawati, I. (2020). Village consultative institution status as a form of democracy life in the village. *Proceedings of the 2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019)*.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200225.016>
- Susbiyani, A. (2016). Audit kinerja sektor publik dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada SKPD di Pemerintah Kota Bondowoso. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 4(15).
- Suseno, Handoko, Kusbandrijo, & Chairus. (2021). Implementation of policy for the use of village fund in Durungbanjar Village, Sidoarjo Regency. *Public Policy and Administration Research*. <https://doi.org/10.7176/PPAR/11-10-02>
- Syah, S. R., Sufardi, S., & Sulaeha, S. (2022). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 3(2). <https://doi.org/10.37531/bijak.v3i2.2161>
- Syapitri, H., Amila, N., & Aritonang, J. (2021). *Buku ajar metodologi penelitian kesehatan*. Ahlimedia Book.
- Utari, C. W., & Nawangsari, E. R. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2022. *IRPIA: Jurnal Ilmiah*

Riset dan Pengembangan, 8(7), 19–30.
<https://doi.org/10.71040/irpia.v8i7.235>

Wibowo, E. A. B. (2024). Analisis flypaper effect pada pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 3(4), 33–46.

Yuhandra, E., & Adhyaksa, G. (2018). The effectiveness of village consultative body in Kuningan District in implementing legislative function. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 106.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.922>

Yuniarsih, T., & Suwatno. (2013). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.